



RUPST BANK OCBC NISP

Presiden Direktur PT. Bank OCBC NISP Tbk, Parwati Surjandaja (kiri) berbincang dengan Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk, Hartati (kanan) usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank OCBC NISP Tbk di Jakarta, Selasa (5/4). Dalam RUPST PT Bank OCBC NISP Tbk tersebut disepakati membagikan dividen untuk tahun buku 2021 senilai Rp504 miliar atau Rp22 per saham kepada para investor.

Menkeu: APBN Akan Rumuskan Langkah Pengamanan Tekanan Global

Pemerintah terus memonitor dinamika ekonomi dan volatilitas harga komoditas guna menyusun analisis risiko ekonomi dan fiskal atas berbagai skenario untuk merumuskan langkah antisipasi.

JAKARTA (IM) - Keadan geopolitik Rusia – Ukraina menjadi risiko ancaman pemulihan ekonomi karena kenaikan harga-harga komoditas domestik. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan yang luar biasa dari harga komoditas mempengaruhi APBN. Di satu sisi memberikan daya tambah penerimaan negara, namun di sisi lain masyarakat juga merasakan rambatan dari inflasi global tersebut.

“Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut. Dari sisi APBN kita akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat,” ungkap Sri Mulyani dilansir dari laman Kemenkeu, Selasa (5/4).

Untuk itu, Pemerintah terus memonitor dinamika ekonomi dan volatilitas harga komoditas guna menyusun

analisis risiko ekonomi dan fiskal atas berbagai skenario untuk merumuskan langkah antisipasi. Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan berbagai strategi dalam merespon pergerakan ekonomi melalui berbagai bauran kebijakan yang dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi masyarakat rentan dan miskin.

“Tadi Bapak Presiden telah menginstruksikan, seperti yang disampaikan Pak Menko (Airlangga Hartarto), untuk kita bisa melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN,” jelas Sri Mulyani.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, Presiden juga meminta para menteri untuk melakukan program-program pemulihan ekonomi yang difokuskan pada program labor intensive atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan

kesempatan kerja. Selain itu, pemerintah juga akan mulai meningkatkan langkah-langkah koordinasi di bidang ketahanan pangan seperti pembukaan lahan, irigasi, dan ketersediaan pupuk serta bibit untuk komoditas yang sebenarnya dapat tumbuh di Indonesia.

“Semua negara di dunia

sekarang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan,” ujarnya.

Terakhir ia menyampaikan, APBN akan mendukung langkah-langkah untuk mengamankan masyarakat, terutama

yang merasakan tekanan akibat dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia. APBN akan dimanfaatkan secara tepat sehingga mampu menjaga keselamatan rakyat, menjaga keselamatan ekonomi, dan menjaga kesehatan dari APBN itu sendiri. • dro

Pembiayaan BSI kepada UMKM Capai Rp40 Triliun

JAKARTA (IM) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen untuk terus meningkatkan dukungan terhadap UMKM yang terbukti dari porsi pembiayaan terhadap UMKM di Februari 2022 yang mencapai 23,12 persen atau sebesar Rp40 triliun.

“Porsi pembiayaan UMKM di BSI terus meningkat baik secara jumlah maupun persentasenya,” kata Direktur Retail Banking BSI Kokok Alun Akbar dalam webinar yang diselenggarakan Indef di Jakarta, Selasa (5/4).

Dilansir Antara, Kokok menyebutkan, pada Desember 2020, porsi pembiayaan kepada UMKM sebanyak 22,37 persen atau Rp35 triliun dari total pembiayaan Rp156,9 triliun. Kemudian pada Desember 2021 persentase pembiayaan UMKM naik menjadi 23,04 persen atau Rp171,3 triliun dan lalu kembali sedikit meningkat di Februari 2022 dengan persentase 23,12 persen dari total pembiayaan Rp171,9 triliun.

Sisa pembiayaan, lanjut dia, sebesar Rp132 triliun disalurkan kepada pembiayaan konsumen yang tidak

hanya kepada pegawai negeri dan pensiunan namun kepada pelaku UMKM. Namun digunakan untuk pembelian rumah dan kendaraan. Sedangkan 20 persen pembiayaan disalurkan untuk pembiayaan korporat.

Terkait roadmap BSI untuk pembiayaan UMKM, Kokok menyampaikan bahwa perseroan mengikuti peraturan OJK yang menggunakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang naik bertahap dari 20 persen menjadi 30 persen di 2024. “Secara ketentuan Alhamdulillah BSI di Desember 2021 kalau kita hitung secara RPIM sudah 27 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut Kokok menuturkan bahwa BSI memiliki sejumlah strategi untuk mendukung UMKM, dimulai dari pembiayaan KUR-Mikro-SME, transaksi keuangan syariah, capacity building UMKM, peningkatan akses pasar go digital, BSI Smart Agen dan penguatan halal value chain.

“BSI Smart Agen bisa memberikan layanan seperti perbankan. Ini tentu bisa menambah pendapatan UMKM karena fee bank kita bagi dua. 50 persen untuk bank dan 50 persen untuk

agen,” jelas dia.

BSI juga melakukan pembiayaan yang berkesinambungan dan terdiri dari 4 jenis. Pertama, UMKM yang tidak feasible (tidak layak) dan tidak bankable (tidak memenuhi syarat bank). BSI menggunakan pembiayaan dana CSR, dana bergulir dan Ziswaf untuk membiayai UMKM yang berada di jenis pertama.

Kedua, UMKM yang feasible tapi tidak bankable. BSI memberikan pembiayaan melalui program penjaminan dan pembiayaan KUR. Lalu ada pembiayaan untuk UMKM yang tidak feasible tapi bankable yang sumber pembiayaan berasal dari avalis, off taker, ekosistem hingga kemitraan. Sedangkan jenis pembiayaan keempat adalah untuk UMKM yang feasible dan bankable dengan pendanaan berasal dari pembiayaan komersial. “Kita juga melakukan penguatan akses pasar seperti go digital, kemitraan, sinergi dengan pemerintah dan UMKM Expo yang terakhir di Dubai,” kata dia. • pan

Topang Kinerja Sektor Mamin, Industri Pengolahan Susu Bertransformasi Digital

JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0, dengan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan adalah industri makanan dan minuman (mamin). Dalam peta jalan tersebut, industri mamin didorong untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor.

“Making Indonesia 4.0 merupakan sebuah roadmap yang diinisiasi oleh Kemenperin dan diluncurkan secara resmi oleh Bapak Presiden Joko Widodo sejak tahun 2018 lalu, dengan tujuan untuk mengembangkan sektor industri manufaktur di tanah air agar bisa mengadopsi teknologi digital sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan berdaya saing global,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya secara virtual pada Bimbingan Teknis Transformasi 4.0 untuk Koperasi dan Tempat Penerimaan Susu (TPS), Selasa (5/4).

Agus mengemukakan, industri mamin merupakan salah satu motor penggerak utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan didukung oleh sumber daya alam yang berlimpah dan permintaan domestik yang terus meningkat. “Walaupun terdampak pandemi Covid-19, PDB industri mamin masih mampu tumbuh positif sebesar 2,54% pada tahun 2021,” ungkapnya.

Bahkan, pada periode yang sama, industri mamin berkontribusi sebesar 38,05% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas. “Capaian tersebut menjadikan industri mamin sebagai subsektor dengan kontribusi PDB paling besar,” imbuhnya.

Pada tahun 2021, nilai pengapalan industri mamin mencapai USD44,82 miliar atau berkontribusi sebesar 25,3% terhadap ekspor industri pengolahan nonmigas. Neraca perdagangan industri mamin pada tahun 2021 surplus sebesar USD31,52 miliar. “Sementara itu, di sisi lain, minat

investasi di bidang industri mamin di Indonesia juga masih cukup besar, yaitu mencapai Rp58,9 triliun di tahun 2021,” sebut Agus.

Salah satu sektor penopang kinerja gemilang pada industri mamin adalah industri pengolahan susu, yang juga mendapat prioritas pengembangan sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. “Namun demikian, industri ini masih dihadapkan pada tantangan pemenuhan bahan baku, karena sampai saat ini sekitar 0,87 juta ton atau 21% bahan baku merupakan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN),” tutur Agus.

Bahan baku yang masih didatangkan dari luar negeri, di antaranya dalam bentuk skim milk, whole milk, anhydrous milk fat, butter milk, dan whey. “Dalam periode lima tahun terakhir, pasokan SSDN tumbuh rata-rata 0,9% per tahun, sedangkan kebutuhan industrinya tumbuh hingga 6% per tahun,” tandasnya. • dro



PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

Indika Energy Garap Setrum Hijau Selaras dengan Transisi Energi G20

JAKARTA (IM) - Perusahaan investasi dengan portofolio bisnis yang terdiversifikasi PT Indika Energy Tbk berkomitmen memperluas bisnis di bidang setrum hijau yang selaras dengan isu transisi energi yang kini menjadi pembahasan dalam presidensi G20 Indonesia.

Wakil Direktur Utama Indika Energy Azis Armand dalam pernyataan yang dikutip Antara, di Jakarta, Selasa (5/4) mengatakan, pihaknya senang menjadi bagian transisi energi di Indonesia melalui anak usahanya PT Empat Mitra Indika Tenaga Surya (EMITS) yang fokus membangun setrum hijau.

“Kami senang bagian dari ini EMITS, tapi tentu saja dari transisi ini harus kita pikirkan bukan hanya semata-mata switch saja dari fuel ke energi terbarukan,” ujarnya.

Azis menyampaikan bahwa perusahaannya ikut menjadi bagian dari transisi energi bukan hanya dari sisi investasi,

tetapi juga dari sisi adaptasi teknologi. “Transisi energi ini perlu insinyur yang berbeda dengan insinyur-insinyur lain, hal-hal seperti itu contohnya, itu yang kami ingin berpartisipasi aktif,” kata Aziz. Indika Energy lantas berkolaborasi dengan perusahaan penyedia setrum hijau asal India bernama Fourth Partner Energy dengan membentuk EMITS pada Maret 2021.

EMITS bertugas meng-

garap bisnis energi terbarukan sebagai salah satu upaya diversifikasi bisnis Indika Energy untuk mencapai target pendapatan 50 persen dari sektor non batu bara pada 2025, sekaligus bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan target netralitas karbon pada 2060.

Melalui anak usahanya itu, Indika Energy menargetkan bisa mendapatkan kontrak pemasangan pembangkit listrik tenaga surya sebesar 80 sampai 100 MWp pada 2022 dan 500 MWp pada 2025 dengan belanja modal yang dibutuhkan sekitar 250 juta dolar AS. EMITS telah melakukan kemitraan bersama dengan beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia yang menjalankan bisnis di area perkebunan, pulp and paper, pembangkit listrik, pertambangan, produk kayu, gedung perkantoran, pelabuhan hijau.

Pada Maret 2022, EMITS menandatangani perjanjian dengan PT Mangole Timber Producer yang merupakan bagian dari grup Sampoerna Kayoe untuk membangun PLTS ground-mounted berkapasitas 12 MWp dan sistem baterai 3 MWh di wilayah operasional grup Sampoerna Kayoe yang berlokasi di Mangole, Maluku Utara.

Saat ini, kapasitas baterai PLTS ground-mounted tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia. • hen



PERTAMBAHAN PERJALANAN KAI COMMUTER
Penumpang menunggu keberangkatan kereta di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (5/4). VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, KAI Commuter menambah 46 perjalanan per harinya atau dari 1.007 perjalanan menjadi 1.053 dengan 94 rangkaian untuk menyesuaikan layanan operasional KRL Jabodetabek.

OCBC NISP Salurkan Pembiayaan Berkelanjutan Sebesar Rp30,89 T

JAKARTA (IM) - Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) Parwati Surjandaja mengatakan, perseroan telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp30,89 triliun per 31 Desember 2021.

“Dimana 40 persen di antaranya merupakan penyaluran dalam bentuk green financing,” kata Parwati dalam Paparan Publik RUPST daring, seperti dilansir dari Antara, Selasa (5/4).

Ia mengatakan Bank OCBC NISP melihat bahwa pembiayaan berwawasan lingkungan merupakan bagian penting yang harus terus didorong. “Bank secara berkelanjutan meneruskan eksplorasi atas potensi calon debitur atau debitur yang memiliki usaha di sektor yang mendukung pembiayaan hijau,” katanya.

Bank OCBC NISP juga menunjukkan komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan dengan mempermudah pelaku usaha perempuan mengakses pembiayaan melalui program TAYTB Women Warrior.

Hingga Desember 2021, Bank telah menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 1.000

pengusaha perempuan. “Ke depannya, Bank OCBC NISP akan terus berinovasi agar perempuan Indonesia dapat mengembangkan potensi usaha yang diyakini berkontribusi terhadap perekonomian,” ucapnya.

Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk Hartati menambahkan sampai akhir tahun 2021 total kredit yang direstrukturisasi tersisa Rp16,9 triliun atau turun dari akhir tahun sebelumnya senilai Rp19,0 triliun.

“Sejalan dengan perbaikan situasi pandemi total kredit yang direstrukturisasi turun jadi Rp16,9 triliun,” kata Hartati.

Adapun restrukturisasi kredit yang disalurkan Bank OCBC NISP yang berkaitan dengan Covid-19 mencapai 83 persen, sementara yang tidak berkaitan mencapai 17 persen.

Dengan demikian kredit yang berkaitan dengan Covid-19 dan direstrukturisasi sampai akhir tahun 2021 mencapai 12 persen dari total kredit.

“Dari total kredit yang direstrukturisasi, porsi kredit yang menjadi NPL mencapai 10 persen dari semua kredit yang direstrukturisasi,” katanya. • dot